

KAMUS ISTILAH

BIDANG PEKERJAAN UMUM

ISTILAH UMUM



A

Adaptasi Perubahan Iklim

Tindakan penyesuaian sistem alam dan sosial untuk menghadapi dampak negatif dari perubahan iklim. Upaya ini bertujuan untuk : (1) mengurangi kerentanan sosial-ekonomi dan lingkungan yang bersumber dari perubahan iklim, (2) meningkatkan daya tahan (*resilience*) masyarakat dan ekosistem, (3) meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (mengentaskan kemiskinan). (Sumber: 23)

Akuntabilitas Kinerja

Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. (Sumber: 24)

Amortisasi

Dalam terminologi keuangan berarti penghapusan secara berangsur-angsur dari sejumlah uang setelah jangka waktu tertentu. Dalam terminologi fiskal berarti pengurangan nilai dari aset tertentu. Dalam terminologi teknik berarti waktu yang diharapkan dari penggunaan suatu aset. (Sumber: 16)

Anggaran

Sejumlah biaya yang diperuntukkan untuk membayai kegiatan pembangunan dan tugas umum pemerintahan. (Sumber: 20)

Aset

Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum

dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. (Sumber: 3)

Asuransi Mortgage

Asuransi yang menjamin pengembalian pinjaman ke bank jika terjadi *default* terhadap suatu KPR. Tujuannya adalah menjamin likuiditas bank dan terbebasnya debitur KPR bila terjadi *default*, dan sisa cicilan akan ditutup oleh pihak asuransi. (Sumber: 16)

B

Badan Layanan Umum (BLU)

Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. (Sumber: 1)

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)

Badan yang bertugas menangani upaya penanggulangan semburan lumpur, menangan luapan lumpur, menangan masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo, dengan memperhatikan risiko lingkungan yang terkecil. Badan ini melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden. Dibentuk melalui Keppres 14 tahun 2007 tentang BPLS. (Sumber: 8)

Bagan Akun Standar

Daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. (Sumber: 3)

Bangun Guna Serah (*Build Operate and Transfer*)

Pengusahaan infrastruktur, misalnya jalan tol dimana Badan Usaha berkewajiban

untuk membangun jalan tol dan/atau fasilitas, termasuk pembiayaan, yang dilanjutkan dengan pengoperasian dan pemeliharaan dalam jangka waktu tertentu serta berhak menarik biaya pemakaian layanan dari pengguna untuk mengembalikan modal investasi, biaya pengoperasian dan pemeliharaan serta keuntungan yang wajar, dan setelah berakhirnya Perjanjian Pengusahaan harus diserahkan kepada Pemerintah tanpa penggantian biaya apapun. (Sumber: 2)

Bantuan Teknis (dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Technical Assistance* atau TA)

Bantuan modal, tenaga ahli, dsb dari luar negeri untuk melancarkan usaha negara yang sedang berkembang. (Sumber: 19)

Barang Milik Negara (BMN)

Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. (Sumber: 14)

Belanja Barang

Pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja ini terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas. (Sumber: 3)

Belanja lain-lain

Pengeluaran/belanja pemerintah pusat yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran diatas. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah. (Sumber: 3)

Belanja Mengikat

Belanja yang dibutuhkan secara terus

menerus selama 1 tahun dan harus dialokasikan oleh kementerian Negara/lembaga dengan jumlah yang cukup pada tahun yang bersangkutan. (Sumber: 3)

Belanja Modal

Pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual. (Sumber: 3)

Belanja Pegawai

Pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum bestatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. (Sumber: 3)

Belanja Tidak mengikat

Belanja yang dibutuhkan secara insidentil (tidak terus menerus) dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan. (Sumber: 3)

D

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Dokumen pelaksanaan anggaran yang berusaha menghimpun seluruh perencanaan dan penganggaran sebagai satu kesatuan yang utuh. Pada saat ini baru menghimpun seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran Rutin (DIK), anggaran pembangunan (DIP), dan kegiatan yang dibiayai PNPB (DIKS). Penganggaran terpadu diharapkan dapat dilaksanakan pada akhir masa transisi. (Sumber: 20)

Dana Dekonsentrasi

Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. (Sumber: 14)

Dana Tugas Pembantuan

Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. (Sumber: 14)

Data Literal = Non Spasial = Numerik

- Berbentuk grafik dan teks atau numerik
- Berwujud nomor (angka), bersifat angka / sistem angka. (Sumber: 17)

Data Spasial

- Berkenaan dengan ruang atau tempat.
 - Dikenal sebagai geospasial atau informasi geografi.
 - Data spasial dapat menunjang sistem sebagai upaya dalam menghasilkan informasi tertentu sesuai dengan kebutuhannya.
 - Terdiri dari lokasi eksplisit suatu geografi yang diset ke dalam bentuk koordinat.
- (Sumber: 17)

Dekonsentrasi

Pemimpinan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. (Sumber: 14)

E**E-Procurement**

Kegiatan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa melalui media elektronik (mencakup informasi dan komunikasi) yang berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi. (Sumber: 9)

Eskalasi Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

Penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak pengadaan barang dan jasa pemborongan sebagai akibat kenaikan harga BBM. (Sumber: 7)

Evaluasi

Penilaian terhadap suatu kegiatan yang membandingkan antara hasil yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai pada kurun waktu tertentu dengan menggunakan ukuran-ukuran dan indikator tertentu. (Sumber: 16)

K**Kebijakan**

Arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan. (Sumber: 25)

Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI)

Komite yang bertanggung jawab kepada Presiden dan bertugas untuk:

- Merumuskan strategi dalam rangka koordinasi pelaksanaan percepatan penyediaan infrastruktur;
- Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur oleh Menteri Terkait dan Pemerintah Daerah;
- Merumuskan kebijakan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*Public Service Obligation*) dalam percepatan penyediaan infrastruktur;
- Menetapkan upaya pemecahan berbagai permasalahan yang terkait dengan percepatan penyediaan infrastruktur. (Sumber: 22)

Kontrak Operasi dan Pemeliharaan

Pengusahaan infrastruktur dimana Badan Usaha berkewajiban untuk memberikan jasa layanan operasi dan pemeliharaan dalam jangka waktu tertentu untuk mengoperasikan atau mendukung pengoperasian suatu infrastruktur. (Sumber: 2)

Kontrak Perencanaan dan Pembangunan (*Design and Build Contract*)

Suatu kontrak dimana pemilik proyek mempersiapkan program kebutuhannya dan perencanaan dasar (*basic desain*), kemudian memilih suatu badan yang bertindak sebagai arsitek, perencana dan kontraktor pelaksana dalam satu kontrak untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi. Selama pelaksanaan pekerjaan, pemilik proyek akan memeriksa apakah perencanaan dan konstruksi telah memenuhi kriteria yang telah disyaratkan. (Sumber: 4)

Kontrak Tahun Jamak

Kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Provinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota. (Sumber: 5)

Kontrak Tahun Tunggal

Kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa 1 (satu) tahun anggaran. (Sumber: 5)

Kontrak Tim Pembangunan (*Building Team Contract*)

Suatu kerjasama sementara dimana, pemilik proyek, konsultan perencana dan kontraktor bekerja sama dalam suatu proses pembangunan. Kontraktor biasanya tidak dipilih melalui suatu seleksi dan kontraktor menghitung biaya konstruksi berdasarkan perkiraan biaya secara terbuka. (Sumber: 4)

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Skema Kredit/Pembiayaan yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dan Koperasi yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan Perbankan. Tujuan akhir diluncurkan Program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. (Sumber: 18)

L**LAKIP**

Alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dibuat secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada pimpinan Departemen/ Lembaga pemerintah non Departemen, masing-masing menteri/pimpin lembaga pemrintah Non departemen menyampaikannya kepada Presiden dan wakil presiden dengan tembusan kepada menteri negara bidang pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara serta kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan. (Sumber: 24)

Lembaga

Organisasi non kementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. (Sumber: 25)

Laporan Barang Milik Negara (BMN)

Laporan yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMN yang terjadi selama periode tersebut. (Sumber: 14)

M**Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)**

Keluarga/rumah tangga yang mempunyai penghasilan maksimum Rp 1,5 juta per bulan (Sumber: 20)

Misi

- Suatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksanakan dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal

Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (RAKORBANGPUS)

Merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan nasional dalam Rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan yang bertujuan untuk mensosialisasikan dan menyempurnakan rancangan awal RKP tahunan dan pagu indikatif tahunan per kementerian dan lembaga sebagai bahan penyiapan rencana kerja (RENJA) kementerian/lembaga tahunan. Selanjutnya penyempurnaan tersebut akan dilakukan melalui forum konsultasi yang intensif antara masing-masing kementerian/lembaga dengan Bappenas dan Depkeu, serta dilakukan dengan daerah melalui Musrenbangnas. (Sumber: 26)

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. (Sumber: 25)

Rehabilitasi

Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. (Sumber: 13)

Rekonstruksi

Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. (Sumber: 13)

instansi pemerintah, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. (Sumber: 24)

2. Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan isi. (Sumber: 25)

Mitigasi Perubahan Iklim

Serangkaian upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas penyerapan karbon dan pengurangan emisi gas-gas rumah kaca (GRK) ke atmosfer yang berpotensi menipiskan lapisan ozon. Upaya mitigasi terutama difokuskan untuk 2 (dua) sektor yaitu (1) sektor kehutanan sebagai sumber mekanisme *carbon sink* (pemeliharaan hutan berkelanjutan, pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, pencegahan *illegal logging*, pencegahan kebakaran hutan serta rehabilitasi hutan dan lahan), (2) sektor energi untuk mengurangi emisi GRK yang berasal dari pembangkitan energi, transportasi, industri, perkotaan dan lahan gambut. (Sumber: 23)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)

Forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. (Sumber: 25)

P

Pagu Indikatif

Perkiraan jumlah maksimum anggaran yang diberikan kepada Kementerian Negara/Lembaga untuk setiap program sesuai dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan, sebagai acuan dalam penyusunan RENJA-KL. (Sumber: 20)

Pagu Sementara

Batas maksimum anggaran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada

Kementerian Negara/Lembaga untuk setiap program sebagai hasil pembahasan antara Pemerintah dengan DPR-RI terhadap kebijakan umum dan prioritas anggaran. Pagu Sementara digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-KL Sementara. (Sumber: 20)

Pagu Definitif

Batas maksimum anggaran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada Kementerian Negara/Lembaga untuk setiap program sebagai hasil pembahasan antara Pemerintah dengan DPR-RI terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Pagu Definitif digunakan sebagai acuan dalam penyesuaian RKA-KL Sementara menjadi RKA-KL definitif. (Sumber: 20)

Panitia Pengadaan Tanah (P2T)

Panitia yang dibentuk untuk membantu pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. (Sumber: 12)

Pembangunan Nasional

Upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. (Sumber: 25)

Pengadaan Tanah

Setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah. (Sumber: 12)

Perencanaan

Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. (Sumber: 25)

Perencanaan Strategik

Suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik mengandung

visi, misi, tujuan/ sasaran, dan program yang realitis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. (Sumber: 24)

PKPD PU (Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum)

Kegiatan yang dilakukan Departemen Pekerjaan Umum untuk memberikan penilaian, pembinaan sekaligus apresiasi secara obyektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel, kepada Pemerintah Daerah terhadap komitmen serta prestasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum.

(Sumber: 29)

Program

Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

(Sumber: 25)

Program Kementerian/Lembaga/Satuan/Kerja Perangkat Daerah

Sekumpulan rencana kerja suatu kementerian/lembaga atau kesatuan kerja perangkat daerah.

(Sumber: 25)

Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah

Sekumpulan rencana kerja terpadu antar-kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah, atau kawasan. (Sumber: 25)

Program Lintas Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sekumpulan rencana kerja beberapa kementerian/lembaga atau beberapa satuan kerja perangkat daerah.

(Sumber: 25)

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)

Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. (Sumber: 10)

Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL)

Dokumen perencanaan Kementerian Negara/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. (Sumber: 10)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. (Sumber: 10)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. (Sumber: 10)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga atau Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra- KL)

Dokumen perencanaan Kementerian / Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun. (Sumber: 10)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)

Dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. (Sumber: 10)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. (Sumber: 10)

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)

Dokumen perencanaan Satuan Kerja

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. (Sumber: 10)

Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)

Merupakan dokumen rencana kerjasama pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota yang bersifat terpadu dan lintas sektoral. RPIJM dimaksudkan bukan untuk menggantikan fungsi RPJMD akan tetapi RPIJM merupakan dokumen teknis kelayakan program untuk rencana pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur) Kabupaten/Kota yang disusun dengan keterpaduan penanganan fisik dan bukan fisik dan investasi jangka menengah (5 tahun). (Sumber: 28)



Sasaran

Penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. (Sumber: 24)

Satuan Kerja

Kuasa pengguna anggaran/pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. (Sumber: 14)

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, desa, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah. (Sumber: 14)

Satuan 2

Dokumen anggaran yang memuat rincian

lokasi pagu anggaran per Program dan Unit Eselon I Iingkup Kementerian/Lembaga Negara. (Sumber: 20)

Satuan 3

Dokumen anggaran yang memuat deskripsi program dan rincian alokasi pagu anggaran per Program, berdasarkan Unit Eselon I , dan Iingkup Satuan Kerja lingkup Kementerian/Lembaga Negara. (Sumber: 20)

Sektor Strategis

Sektor yang mempunyai kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. (Sumber: 28)

Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)

Sub sistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. (Sumber: 14)

Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

Serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. (Sumber: 14)

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah. (Sumber: 25)

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Ukuran yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan. (Sumber: 11)

Strategi

Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. (Sumber: 25)



Tugas Pembantuan

Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. (Sumber: 14)

Tujuan

Penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. (Sumber: 24)



Uang Ganti Kerugian Tanah (Ganti Kerugian)

Pemberian imbalan kepada pemegang hak atas tanah sebagai akibat dari pelepasan hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berada di atasnya, yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak. (Sumber: 15)



Visi

1. Cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. (Sumber: 24)
2. Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. (Sumber: 25)

SUMBER:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 91 / PMK. 06 / 2007. Tentang Bagan Akun Standar
4. Kajian Penerapan Kontrak Berbasis Kinerja untuk Konstruksi Jalan di Atas Tanah Lunak, Departemen Pekerjaan Umum, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.OI/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Resiko Atas Penyediaan Infrastruktur
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 /PMK.06/2005 tentang Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak Kegiatan Pemerintah Tahun Anggaran 2005
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
9. Pusat Data dan Informasi Publik, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2007tentang Petunjuk Teknis Pemeliharaan Jalan Tol dan Jalan Penghubung
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
16. Glossary Perkim 2002
17. Pusdata, Dep. PU
18. Website Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha (www.sentraukm.com)
19. Kamus Besar Bahasa Indonesia (www.pusatbahasa.diknas.go.id)
20. Website Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI (www.perbendaharaan.go.id)
21. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2004 Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga
22. Peraturan Presiden No 42 tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
23. Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan iklim (RAN-MAPI) Bidang Pekerjaan Umum, Departemen Pekerjaan Umum, Republik Indonesia
24. Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
25. UU RI No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
26. BAPPENAS
27. Kepmen Kimpraswil No 217/KPTS/M/2002. Tentang: KSNPP (Kebijaksanaan dan Strategi Nasional Perum dan Perkim)
28. Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Cipta Karya
29. Buku Panduan PKPD PU, 2007

SUMBER DAYA AIR



A

Abrasi

Hempasan atau penggerusan oleh gerakan air, dan butiran kasar yang terkandung di dalamnya. (Sumber: 28)

Agradasi Sungai

Peninggian dasar sungai akibat pengendapan. (Sumber: 28)

Air

Semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. (Sumber: 1)

Air Baku

Air yang dipergunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi air minum. (Sumber: 45)

Air Permukaan

Semua air yang terdapat pada permukaan tanah. (Sumber: 1)

Air Tanah

Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. (Sumber: 1)

Aliran Sungai

Gerakan air yang dinyatakan dengan gejala dan parameter dengan ukurannya. (Sumber: 16)

Alokasi Air Sementara

Alokasi yang dihitung berdasarkan perkiraan ketersediaan air yang dapat diandalkan (debit andalan) dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna air yang sudah ada. (Sumber: 1)

Alur Sungai

Alur tempat mengalirnya aliran sungai. (Sumber: 16)

Angka Kebutuhan Nyata Jaringan Irigasi

Besaran biaya yang dihitung berdasarkan kebutuhan aktual pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi tiap bangunan dan tiap ruas saluran untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan irigasi. (Sumber: 2)

Audit Pengelolaan Irigasi

Kegiatan pemeriksaan kinerja pengelolaan irigasi yang meliputi aspek organisasi, teknis, dan keuangan, sebagai bahan evaluasi manajemen aset irigasi. (Sumber: 5)

B

Badan Air

Kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, curah hujan, suhu, dsb, misal sungai, rawa, danau, laut, dan samudra. (Sumber: 46)

Banjir

Aliran yang relatif tinggi, dan tidak tertampung lagi oleh alur sungai atau saluran. (Sumber: 17)

Banjir Lokal

Banjir yang mengganggu fungsi jalan kabupaten/kota bandara lokal, jalan kereta api lintas, sentra produksi pangan lokal, kawasan industri dan perdagangan skala kecil,kawasan strategis kabupaten/kota lainnya (tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota). (Sumber: 45)

Banjir Nasional

Banjir yang mengganggu fungsi jalan nasional, bandara Internasional dan nasional, jalan kereta api lintas provinsi, sentra produksi pangan nasional, kawasan industri dan perdagangan skala besar, kawasan strategis nasional lainnya (tanggung jawab pemerintah). (Sumber: 45)

Banjir Rata-Rata Tahunan

Besar debit banjir dari jumlah rangkaian banjir maksimum tahunan dibagi tahun kejadian. (Sumber: 17)

Banjir Regional

Banjir yang mengganggu fungsi jalan provinsi, bandara nasional/lokal, jalan kereta api lalu lintas kabupaten, sentra produksi pangan provinsi / lokal, kawasan industri dan perdagangan skala sedang, kawasan strategis provinsi lainnya (tanggung jawab pemerintah provinsi). (Sumber: 45)

Bangunan Bagi

Bangunan yang berfungsi untuk membagi air. (Sumber: 2)

Bangunan Bagi Sadap

Bangunan yang berfungsi untuk membagi air dan sekaligus mengalirkannya ke petak tersier. (Sumber: 2)

Bangunan Intake

Suatu bangunan pada bendung yang berfungsi sebagai penyadap aliran sungai, mengatur pemasukan air dan sedimen serta menghindarkan sedimen dasar sungai dan sampah masuk ke intake. (Sumber: 34)

Bangunan Pelengkap

Bangunan yang melengkapi jaringan utama seperti talang, bangunan silang, terjunan, dan lain-lain. (Sumber: 28)

Bangunan Pembilas

Bangunan yang berfungsi untuk membilas sedimen. (Sumber: 28)

Bangunan Pengaman

Bangunan untuk mencegah kerusakan konstruksi, misal bangunan pelimpah samping, pembuang silang, dsb. (Sumber: 28)

Bangunan Pengatur Muka Air

Bangunan yang berfungsi mengatur/mengontrol ketinggian muka air di saluran primer dan sekunder sampai batas-batas yang diperlukan untuk dapat memberikan debit yang konstan kepada bangunan sadap tersier. (Sumber: 45)

Bangunan Pengelak

Bangunan untuk mengelokkan arah aliran sungai, antara lain bendung. (Sumber: 28)

Bangunan Peredam Energi Bendung

Struktur dari bangunan di hilir tubuh bendung yang terdiri dari berbagai tipe, bentuk dan di kanan kirinya dibatasi oleh tembok pangkal bendung dilanjutkan dengan tembok sayap hilir dengan bentuk tertentu, yang berfungsi meredam energi air akibat pembendungan, agar air di hilir bendung tidak menimbulkan penggerusan setempat yang membahayakan struktur. (Sumber: 34)

Bangunan Sadap

Bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke petak tersier yang letaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat petani dan dituangkan dalam rencana teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. (Sumber: 2)

Bangunan Sungai

Bangunan yang berfungsi untuk perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian sungai. (Sumber: 7)

Bangunan Suplesi

Bangunan yang berfungsi mengalirkan air dari saluran suplesi ke saluran pembawa atau ke sungai. (Sumber: 45)

Bantaran Sungai

Lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam. (Sumber: 7)

Base Flow

Aliran dasar sungai yaitu aliran yang terjadi akibat pergerakan air permukaan. (Sumber: 26)

Bendung

Bangunan melintang alur sungai yang berfungsi untuk meninggikan muka air. (Sumber: 21)

Bendung Tetap

Bendung yang tidak bisa dioperasikan untuk meniadakan pembendungan air. (Sumber: 21)

Bendung Gerak

Bendung yang bisa melayani operasi untuk meniadakan pembendungan air. (Sumber: 21)

Bendung Gerak Pintu

Bendung gerak yang terbuat dari pintu sebagai sarana operasi pembendungan air. (Sumber: 21)

Bendung Karet

Bendung gerak yang terbuat dari tabung karet yang mengembang sebagai sarana operasi pembendungan air. (Sumber: 21)

Bendung Karet Isi Udara

Bendung karet yang menggunakan udara sebagai media pengisi tabung karet. (Sumber: 21)

Bendung Karet Isi Air

Bendung karet yang menggunakan air sebagai media pengisi tabung karet. (Sumber: 21)

Bendung Pembagi Banjir

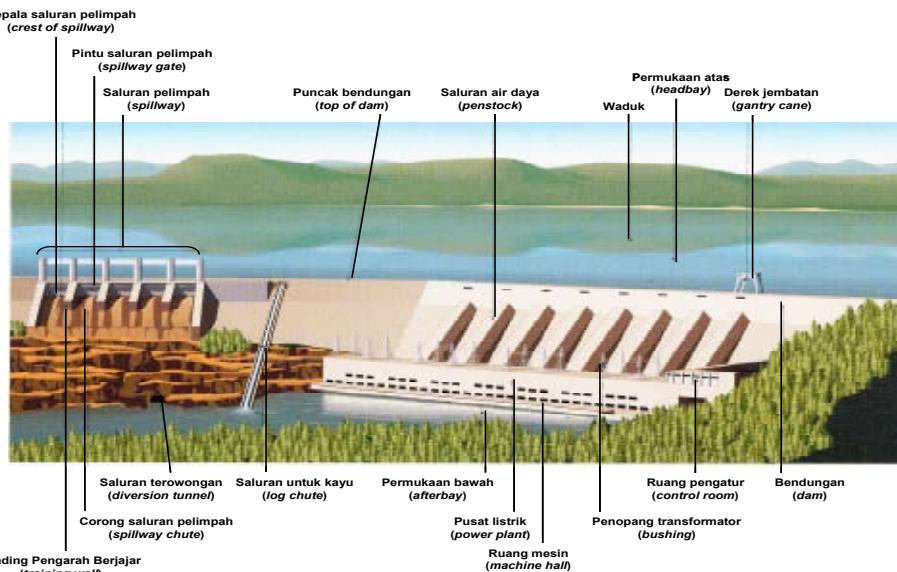
Bendung yang dibangun di percabangan sungai untuk mengatur muka air sungai, sehingga terjadi pemisahan antara debit banjir dan debit rendah sesuai dengan kapasitasnya. (Sumber: 34)

Bendung Penahan Pasang

Bendung yang dibangun di bagian sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut, antara lain untuk mencegah masuknya air asin. (Sumber: 34)

Bendung Penyadap

Bendung yang digunakan sebagai penyadap aliran sungai untuk berbagai keperluan seperti untuk irigasi, air baku, dan sebagainya. (Sumber: 34)



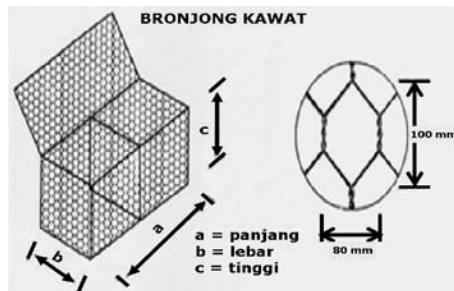
Gambar 1.01 Bendungan (Sumber : 47)

Bendungan

Setiap penahan buatan, jenis urugan atau jenis lainnya, yang menampung air atau dapat menampung air baik secara alamiah maupun buatan, termasuk pondasi, tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya. (Sumber: 18)

Bronjong Kawat

Struktur kotak yang terbuat dari anyaman kawat baja berlapis seng yang pada penggunaannya diisi batu-batu untuk pencegah erosi yang dipasang pada tebing-tebing, tepi-tepi sungai, yang proses penganyamannya menggunakan mesin. (Sumber: 13)



Gambar 1.02 Bronjong Kawat

C

Cekungan air tanah

Suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. (Sumber: 1)

Check Dam

Bendungan kecil yang dibangun dalam sebuah saluran atau alur air yang kecil untuk mengurangi kecepatan aliran sungai, meminimalkan pencarian saluran dan mempromosikan endapan sedimen. (Sumber: 42)

Curah hujan

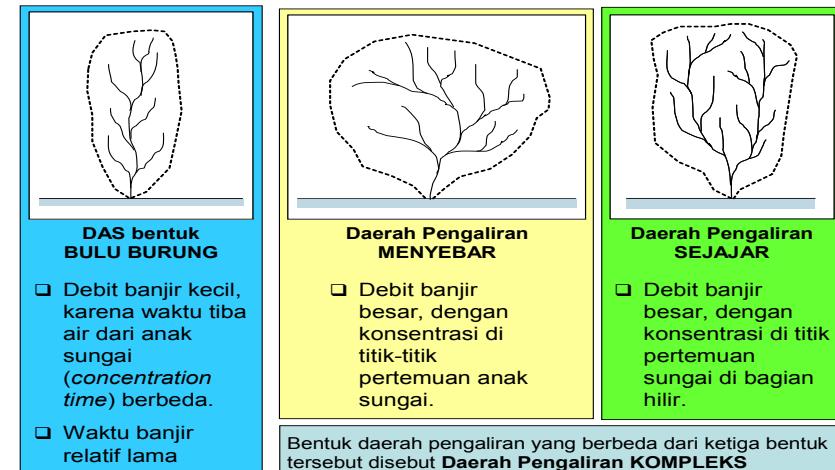
Banyaknya hujan yang turun di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. (Sumber: 46)

D

Daerah Aliran Sungai (DAS)

Suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan

Geometri DAS



Gambar 1.03 Geometri DAS (Sumber : 48)

anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan di wilayah tersebut ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. (Sumber: 1)

Daerah Irigasi

Kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. (Sumber: 2)

Daerah Irigasi Kabupaten/Kota

Daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang seluruh bangunan dan saluran serta luasannya berada dalam satu wilayah kabupaten/kota. (Sumber: 2)

Daerah Irigasi Lintas Kabupaten/Kota

Daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada di lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, tetapi masih dalam satu wilayah provinsi. (Sumber: 2)

Daerah Irigasi Lintas Provinsi

Daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada di lebih dari satu wilayah provinsi, tetapi masih dalam satu negara.
(Sumber: 2)

Daerah Irigasi Lintas Negara

Daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada di lebih dari satu negara. (Sumber: 2)

Daerah Irigasi Strategis Nasional

Daerah irigasi yang luasnya lebih dari 10.000 ha yang mempunyai fungsi dan manfaat penting bagi pemenuhan kebutuhan pangan nasional. (Sumber: 2)

Daerah Tangkapan Air

Suatu daerah yang dibatasi oleh pembatas topografi berupa punggung-punggung bukit atau gunung yang menampung air hujan yang jatuh diatasnya dan kemudian mengalirkannya melalui anak sungai dan

sungai ke laut atau ke danau.
(Sumber: 30)

Danau

Bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan. (Sumber: 7)

Daya Air

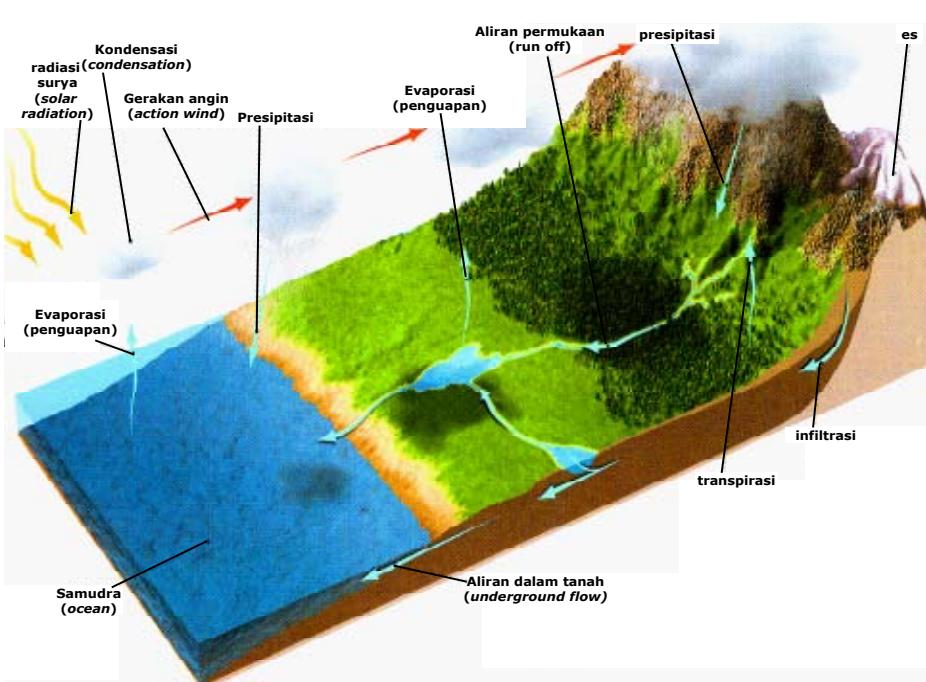
Potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya. (Sumber: 1)

Daya Dukung Sumber Daya Air

Kemampuan sumber daya air untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. (Sumber: 1)

Daya Tampung Air dan Sumber Air

Kemampuan air dan sumber air untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. (Sumber: 1)



Gambar 1.04 Daur Hidrologi (Sumber : 47)

Daya Rusak Air

Daya air yang dapat merugikan kehidupan.
(Sumber: 1)

Debit Aliran

Volume air yang mengalir melalui penampang melintang sungai atau saluran dalam satuan waktu tertentu yang dinyatakan dalam satuan Liter/detik atau m³/detik. (Sumber: 22)

Debit Aliran Dasar

Aliran bawah permukaan ditambah aliran yang berasal dari air tanah.
(Sumber: 17)

Debit Aliran Permukaan

Air yang masuk ke dalam sungai melalui permukaan tanah dan bawah permukaan.
(Sumber: 17)

Debit Banjir Maksimum Tahunan

Debit aliran sesaat dengan puncak hidrograf tertinggi selama satu tahun pencatatan. (Sumber: 17)

Debit Banjir Rencana

Debit maksimum dari suatu sungai, atau saluran yang besarnya didasarkan kala ulang tertentu. (Sumber: 17)

Debit Desain

Besarnya debit banjir maksimum yang ditentukan berdasarkan kala ulang, faktor keamanan, ekonomi, dan sosial.
(Sumber: 17)

Debit Rencana

Debit untuk perencanaan suatu bangunan air. (Sumber: 28)

Debit Puncak

Debit yang terbesar pada suatu periode tertentu. (Sumber: 28)

Degradasi Sungai

Penurunan dasar sungai akibat penggerusan. (Sumber: 28)

Dewan Sumber Daya Air

Lembaga koordinasi pengelolaan sumber daya air yang meliputi Dewan Sumber Daya Air Nasional, dewan sumber daya air provinsi atau dengan nama lain, dan dewan sumber daya air kabupaten/kota atau dengan nama lain. (Sumber: 10)

Dewatering

Usaha pengeringan dengan berbagai cara, misal pemompaan. (Sumber: 28)

El Nino

Fenomena perubahan cuaca di daerah pantai utara Peru dan Ekuador yang terjadi pada setiap beberapa tahun, menyebabkan menghangatnya suhu permukaan Samudra Pasifik, dan berdampak luas pada perubahan cuaca di beberapa bagian dunia. (Sumber: 40)

Eksplorasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa

Serangkaian kegiatan yang mengarah kepada upaya pemanfaatan air secara optimal dan pelestari fungsi jaringan reklamasi rawa. (Sumber: 6)

Eksplorasi Sungai

Usaha pengaturan dan pengalokasian sumber daya air dan sumber daya alam lainnya yang berada di sungai untuk tujuan pendayagunaan secara optimum. (Sumber: 7)

Embung/Waduk Lapangan

Tempat/waduk penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau menampung air hujan. (Sumber: 5)

Erosi

Pengikisan permukaan atau struktur tanah oleh aliran air, gletser, angin dan gelombang laut. (Sumber: 44)

Evaporasi

Proses fisik dimana air bertransformasi menjadi benda gas. Dalam irigasi, penguapan adalah uap air yang hilang dari tanah dan permukaan air.
(Sumber: 42)

Flood Forecasting (Perkiraaan Banjir)

- Prediksi dari suatu keadaan banjir yang akan terjadi dimasa depan (waktu, kedalaman, pengeluaran dll) adalah terkait dengan informasi

terkini. Prediksi dari waktu banjir berdasarkan analisa data meteorologi suhu, misalnya arah gerakan badai, curah hujan awal, kelembaban udara, pergerakan suhu, angin dll. Analisa atas informasi semacam itu yang terkait dengan tanggap keadaan arus dan sifat utama dapat memberikan suatu alasan pemberian peringatan bahaya bencana banjir. Akumulasi dan analisa data yang cepat, penyebaran dari tanda peringatan, adalah penting bagi kehandalan dari suatu prakiraan banjir.

- Ilmu pengetahuan mengenai prakiraan ketinggian air, pengeluaran air, waktu timbulnya banjir dan masa banjir, khususnya puncaknya luapan banjir disuatu titik khusus di sungai, yang merupakan dampak dari curah hujan dan/atau salju yang mencair dan berdasarkan kondisi meteorologi dan hidrologi. Tujuan dari prakiraan banjir adalah untuk mendapatkan waktu curah hujan yang sebenarnya dan data arus melalui gelombang mikro, sistem radio, atau jaringan komunikasi satelit, memasukkan data melalui program penelusuran aliran arus dan luapan curah hujan, dan memprakirakan laju arus banjir dan ketinggian air untuk suatu kurun mulai dari lingkup beberapa jam sampai dengan beberapa hari kedepan, tergantung pada skala dari terjunan/percikan air. (Sumber: 44)

Flood Warning

Peringatan dini akan adanya banjir. (Sumber: 7)

Forum Koordinasi Daerah Irigasi

Sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil perkumpulan petani pemakai air, wakil pengguna jaringan irigasi, dan wakil pemerintah dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi. (Sumber: 2)

G

Gambut

Tanah yang terdiri dari sisa-sisa tanaman yang telah busuk. (Sumber: 24)

Garis Sempadan Jaringan Irigasi

Batas pengamanan bagi saluran-saluran dan/atau bangunan jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan. (Sumber: 2)

Garis Sempadan Sungai

Garis batas kiri kanan saluran yang menetapkan daerah yang dibutuhkan untuk keperluan pengamanan saluran. (Sumber: 7)

Gorong-Gorong

Bangunan air yang dibangun di tempat-tempat dimana saluran melewati bawah bangunan (jalan, rel kereta api dan lain-lain). (Sumber: 45)

Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA)

Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Air yang dilakukan oleh seluruh sektor dan pemangku kepentingan terkait (*Stake Holder*) yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan siklus hidrologi pada seluruh wilayah DAS kritis di seluruh Indonesia. (Sumber: 29)

Groin

Struktur pengaman pantai yang dibangun menjorok relatif tegak lurus terhadap arah pantai, dan bahan konstruksinya umumnya kayu, baja, beton (pipa beton), dan batu. (Sumber: 35)

Groundsill

Bangunan pemecah arus. (Sumber: 25)

H

Hak Guna Air

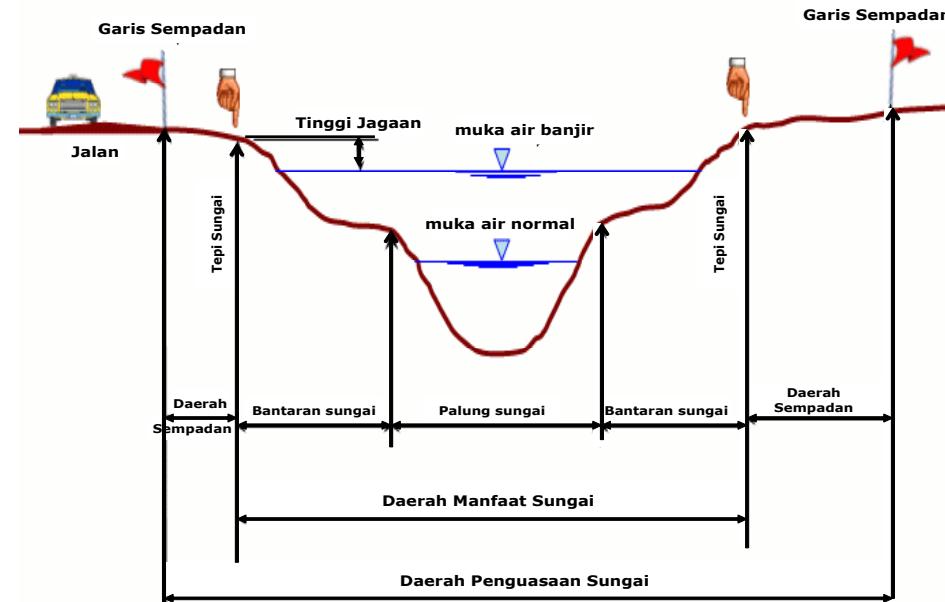
Hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. (Sumber: 1)

Hak Guna Usaha Air

Hak untuk memperoleh dan mengusahakan air. (Sumber: 1)

Hak Pakai Air

Hak untuk memperoleh dan memakai air. (Sumber: 1)



Gambar 1.05 Garis Sempadan Sungai (Sumber : 49)

I

Infiltrasi

Rembesan air melalui celah batuan. (Sumber: 32)

Inspeksi Rutin Jaringan Irigasi

Pemeriksaan jaringan irigasi yang dilakukan secara rutin setiap periode tertentu (10 atau 15 hari sekali) untuk mengetahui kondisi jaringan irigasi. (Sumber: 12)

Intensitas Hujan

Tinggi curah hujan dalam periode tertentu, dinyatakan dalam satuan mm/jam. (Sumber: 17)

Intrusi Air Laut

Perembesan air laut ke dalam lapisan tanah yang menuju ke daratan, sehingga terjadi pencampuran air laut dengan air tanah. (Sumber: 46)

Irigasi

Usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang

pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. (Sumber: 2)

Irigasi Pompa

Irigasi yang sumber airnya berasal dari air tanah atau air permukaan yang dinaikkan dengan menggunakan pompa maupun tenaga penggerak sejenis beserta dengan perlengkapannya. (Sumber: 9)

Izin Prinsip Alokasi Air

Penetapan yang bersifat sementara yang diberikan kepada pengembang sebagai jaminan untuk memperoleh sejumlah air dari sumber air tertentu setelah irigasi siap berfungsi, dan memuat persyaratan antara lain peruntukan, debit air, dan waktu pemberiannya. (Sumber: 2)

J

Jalan Inspeksi Jaringan Irigasi

Jalan sepanjang saluran irigasi dan pembuang untuk keperluan inspeksi. (Sumber: 28)

Jalur Limpasan (Spillway)

Sebuah jalur atau jalan air untuk membuang kelebihan air. Sebuah pekerjaan yang lebih pada bendungan atau hilir dari bendungan pada punggung samping, dalam bentuk sebuah pipa terbuka atau tertutup. (Sumber: 44)

Jaringan Irigasi

Saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. (Sumber: 2)

Jaringan Irigasi Desa

Jaringan irigasi yang dibangun, digunakan, dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa. (Sumber: 2)

Jaringan Irigasi Primer

Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, yang dilengkapi dengan saluran

pembuangan, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, serta bangunan pelengkap lainnya. (Sumber: 2)

Jaringan Irigasi Sederhana

Jaringan irigasi yang mempunyai bangunan semi permanen, dan tidak mempunyai alat pengukur dan pengontrolan aliran, sehingga aliran tidak dapat diatur dan diukur. Pembangunan dan atau penyempurnaannya biasanya mendapatkan bantuan pemerintah. Namun pengelolaan dan pengoperasiannya dilakukan oleh aparat desa. (Sumber: 34)

Jaringan Irigasi Sekunder

Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya. (Sumber: 2)

Jaringan Irigasi Semi Teknis

Jaringan irigasi yang memiliki sedikit bangunan permanen. Dan hanya satu alat pengukur aliran yang biasanya ditempatkan pada bandungan bendung. Sistem pemberian air dan sistem pembangunan air tidak mesti sama sekali terpisah. Pengaliran air ke sawah yang dapat diatur, tetapi banyaknya aliran tidak dapat diukur. Pembagian air tidak dapat dilakukan dengan seksama. (Sumber: 34)

Jaringan Irigasi Teknis

Jaringan yang sudah memisahkan antara sistem irigasi, pembuang, dan jaringan tersier. (Sumber: 28)

Jaringan Irigasi Tersier

Jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya. (Sumber: 2)

Jaringan Reklamasi Rawa

Keseluruhan saluran baik primer, sekunder, maupun tersier dan bangunan yang merupakan satu kesatuan, beserta bangunan pelengkapnya, yang diperlukan

untuk pengaturan, pembuangan, pemberian, pembagian, dan penggunaan air. (Sumber: 6)

K

Kantong Lumpur

Bangunan untuk mengendapkan dan menampung lumpur yang pada waktu tertentu dibilas. (Sumber: 28)

Kapasitas Pompa Air

Daya pompa air yang dapat mengalirkan sejumlah debit air dalam satuan waktu. (Sumber: 20)

Kapasitas Tampungan Waduk

Kemampuan suatu waduk menampung sejumlah air sampai pada tinggi normal. (Sumber: 23)

Karakteristik Saluran

Data saluran berupa debit, kemiringan talut, dan sebagainya. (Sumber: 28)

Kavitasi

Terjadinya tekanan lebih kecil dari 1 atm, yang mengakibatkan gelembung-gelembung udara pada permukaan badan bendung, menimbulkan lubang-lubang karena terlepasnya butiran-butiran agregat dari pemukaan konstruksi. (Sumber: 28)

Kawasan Lindung Sumber Air

Kawasan yang memberikan fungsi lindung pada sumber air, misalnya daerah sempadan sumber air, daerah resapan air, dan daerah sekitar mata air. (Sumber: 1)

Keandalan Air Irigasi

Kondisi/keadaan air irigasi yang dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat, dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk mendukung produktivitas usaha tani secara maksimal. (Sumber: 2)

Keandalan Prasarana Irigasi

Kondisi dan fungsi prasarana jaringan irigasi yang dapat memberikan pelayanan irigasi secara optimal. (Sumber: 2)

Kecepatan Aliran

Laju aliran air untuk menempuh lintasan

air pada satuan waktu tertentu. (Sumber: 19)

Kedalaman Sungai/Saluran Terbuka

Jarak yang diukur ke arah vertikal dari muka air ke dasar sungai/saluran terbuka. (Sumber: 15)

Kelas Air

Peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu. (Sumber: 4)

Ketahanan Pangan

Kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. (Sumber: 3)

Kolam Tandon Air

Tempat penampungan air, dalam kondisi cukup jernih dan mempunyai temperatur antara 20o – 30o. (Sumber: 20)

Komisi Irigasi Antarprovinsi

Lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten/kota yang terkait, wakil komisi irigasi provinsi yang terkait, wakil perkumpulan petani pemakai air, dan wakil pengguna jaringan irigasi lintas provinsi. (Sumber: 2)

Komisi Irigasi Kabupaten/Kota

Lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten/kota, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten/kota. (Sumber: 2)

Komisi Irigasi Provinsi

Lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah provinsi, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi, dan wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang terkait. (Sumber: 2)

Komisi Irigasi Kabupaten/Kota

Lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten/kota, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten/kota. (Sumber: 2)

Konservasi Lahan

Usaha pemanfaatan lahan dalam usaha tani dengan memperhatikan kelas kemampuannya dan dengan menerapkan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air agar lahan dapat digunakan secara lestari. (Sumber: 30)

Konservasi Rawa

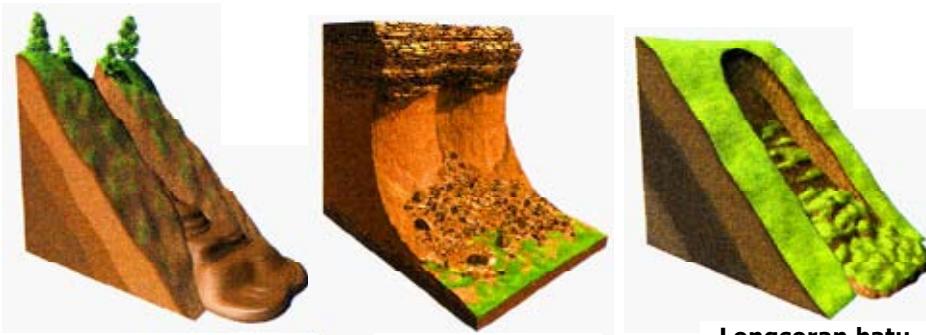
Pengelolaan rawa sebagai sumber air yang berdasar pertimbangan teknis, sosial ekonomis dan lingkungan, bertujuan menjamin dan memelihara kelestarian keberadaan rawa sebagai sumber dari dan/atau meningkatkan fungsi dan pemanfaatannya. (Sumber: 6)

Konservasi Sumber Daya Air

Upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. (Sumber: 1)

L**La Nina**

Fenomena mendinginnya suhu air laut di daerah Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang terjadi setiap beberapa tahun dan berdampak pada perubahan cuaca di beberapa bagian dunia. (Sumber: 40)



Gambar 1.06 Longsor (Sumber : 47)

Lahan Sawah Pasang Surut

Lahan sawah yang pengairannya tergantung pada air sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. (Sumber: 29)

Lahan Potensial Sawah

Bagian dari luas potensial yang dapat dijadikan sawah, yang kondisinya masih berbentuk hutan semak-semak, padi ladang, dikurangi luas potensial. (Sumber: 45)

Lahan Kritis

Lahan yang keadaannya membahayakan stabilitas dan kelangsungan tata air serta alam lingkungan, atau lahan pertanian yang sudah tidak lagi subur untuk ditanami. (Sumber: 29)

Lahan Potensial Kritis

Tanah-tanah yang masih produktif bila diusahakan untuk usaha pertanian, tetapi bila dalam pengelolaannya tidak menggunakan kaidah-kaidah konservasi tanah, maka tanah akan rusak dan cenderung menjadi lahan semi kritis atau lahan kritis. (Sumber: 30)

Lahan Semi Kritis/Hampir Kritis

Tanah-tanah yang kurang produktif akibat terjadinya erosi, tetapi masih dapat diusahakan untuk usaha pertanian, namun demikian produktivitasnya relatif rendah. (Sumber: 30)

Lereng

Sisi (bidang, tanah) yang landai atau miring. (Sumber: 46)

Limpasan Tanggul

Aliran yang melewati tanggul/tebing sungai. (Sumber: 28)

Longsor

Suatu proses perpindahan massa tanah atau batuan dengan arah miring dari kedudukan semula (sehingga terpisah dari massa yang mantap), karena pengaruh gravitasi, serangan arus, gempa, dan lain-lain, dengan jenis gerakan berbentuk rotasi dan translasi. (Sumber: 14)

Luas Minimal Daerah Irrigasi

Perbandingan antara luas lahan pertanian berirrigasi sebesar satu hektar dan kebutuhan beras bagi 25 (dua puluh lima) orang penduduk. (Sumber: 2)

Luas Lahan Rencana (Luas Lahan Baku) Irrigasi

Luas bersih dari suatu daerah irrigasi, yang berdasarkan perencanaan teknis dapat diairi oleh jaringan irrigasi. (Sumber: 45)

Luas Potensial

Bagian dari luas rencana yang jaringan utamanya (saluran primer dan skunder) telah selesai dibangun. (Sumber: 45)

M**Meandering**

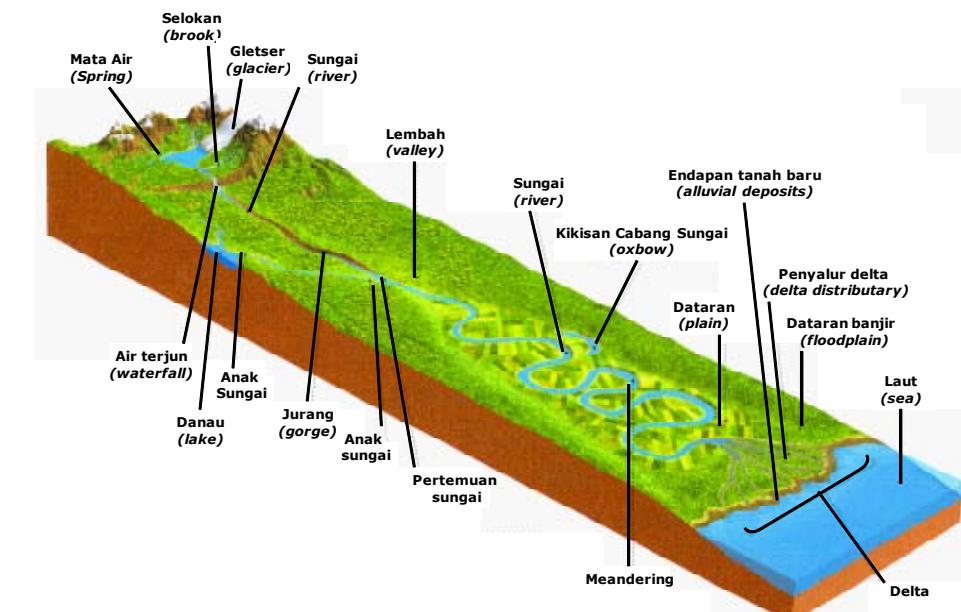
Aliran sungai yang berkelok-kelok dan berpindah-pindah, akibat sedimentasi. (Sumber: 28)

Modifikasi Cuaca

Upaya dengan cara memanfaatkan parameter cuaca dan kondisi iklim pada lokasi tertentu untuk tujuan meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan cuaca, seperti kekeringan, banjir, dan kebakaran hutan. (Sumber: 1)

Morfologi Sungai

Bentuk dan keadaan alur sungai sehubungan dengan alirannya. (Sumber: 28)



Gambar 1.07 Meandering (Sumber : 47)

N

Neraca Air

Keseimbangan air, membandingkan air yang ada, air hilang dan air yang dimanfaatkan. (Sumber: 28)

Normalisasi Saluran

Tindakan mengembalikan kondisi saluran (dimensi maupun garis sempadan) yang ada ke kondisi awal sesuai perencanaan. (Sumber: 46)

O

Operasi Sumber Daya Air

Kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sumber daya air. (Sumber: 1)

Operasi Jaringan Irigasi

Upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi. (Sumber: 2)

P

Palung Sungai

Cekungan yang terbentuk oleh aliran air secara alamiah, atau galian untuk mengalirkan sejumlah air tertentu. (Sumber: 7)

Pasang Surut Laut

Gelombang yang dibangkitkan oleh adanya interaksi antara laut, matahari, dan bulan. (Sumber: 43)

Pemanasan Global (Global Warming)

Fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca (*greenhouse effect*) yang disebabkan oleh meningkatnya

emisi gas-gas seperti karbondioksida (CO₂), metana (CH₄), dinitrooksida (N₂O) dan CFC sehingga energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi. (Sumber: 31)

Pembagian Air Irigasi

Kegiatan membagi air di bangunan bagi maupun bangunan sadap dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder. (Sumber: 2)

Pembuangan Air Irigasi/Drainase

Pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu melalui saluran pembuangan. (Sumber: 2)

Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi

Usaha untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan irigasi yang dilaksanakan secara berkala. (Sumber: 12)

Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya. (Sumber: 2)

Pemeliharaan Sumber Daya Air

Kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air. (Sumber: 1)

Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi

Usaha untuk mempertahankan kondisi

dan fungsi jaringan irigasi yang dilaksanakan setiap waktu. (Sumber: 12)

Pemeliharaan Sungai

Usaha-usaha yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sungai sebagai sumber daya, serta untuk menjamin kelestarian fungsi bangunan sungai. (Sumber: 7)

Penampang Basah Sungai/Saluran Terbuka

Penampang melintang sungai/saluran terbuka yang dibatasi oleh dasar sungai dan muka air. (Sumber: 15)

Penataan Ulang Sistem Irigasi

Pengaturan kembali sistem irigasi yang berkaitan dengan aspek teknis dan administratif, misalnya tata letak saluran, dimensi saluran, pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi, dan penghapusan pembiayaannya. (Sumber: 2)

Pencetakan Sawah

Kegiatan mengubah fungsi areal tanah bukan sawah menjadi sawah beririgasi. (Sumber: 8)

Pendayagunaan Sumber Daya Air

Upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. (Sumber: 1)

Penelusuran Jaringan Irigasi

Kegiatan pemeriksaan secara langsung kondisi dan fungsi jaringan irigasi. (Sumber: 2)

Pengamanan Jaringan Irigasi

Upaya menjaga kondisi dan fungsi jaringan irigasi serta mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan terhadap jaringan dan fasilitas jaringan, baik yang diakibatkan oleh ulah manusia, hewan, maupun proses alami. (Sumber: 11)

Pengaturan Air Irigasi

Kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi. (Sumber: 2)

Pengelolaan Air di Tingkat Usaha Tani

Segala usaha pendayagunaan air pada petak-petak tersier dan jaringan irigasi pedesaan, melalui pemanfaatan jaringan irigasi yang langsung berhubungan dengan petani dan arela pertaniannya, guna memenuhi kebutuhan optimum pertanian, termasuk pemeliharaan jaringannya. (Sumber: 9)

Pengelolaan Aset Irigasi

Proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi

seefisien mungkin. (Sumber: 2)

Pengelolaan Jaringan Irigasi

Kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi. (Sumber: 2)

Pengelolaan Sumber Daya Air

Upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. (Sumber: 1)

Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu

Pengelolaan sumber daya air yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemilik kepentingan antar sektor dan antar wilayah administrasi. (Sumber: 1)

Pengelolaan Sumber Daya Air Berwawasan Lingkungan

Pengelolaan sumber daya air yang memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan. (Sumber: 1)

Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan

Pengelolaan sumber daya air yang tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga termasuk untuk kepentingan generasi yang akan datang. (Sumber: 1)

Pengembangan Daerah Rawa

Pematangan dan pemanfaatan lahan tanah di daerah-daerah rawa antara lain untuk pertanian. (Sumber: 45)

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)

Penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta masyarakat petani mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, sampai dengan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi. (Sumber: 11)

Pengembangan Jaringan Irigasi

Pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada. (Sumber: 2)

Pengembangan Sungai

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sungai sebesar-besarnya tanpa merusak keseimbangan sungai dan lingkungannya. (Sumber: 7)

Pengendalian Daya Rusak Air

Upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. (Sumber: 1)

Pengendalian Sungai

Upaya untuk lebih memantapkan aliran sungai sepanjang tahun, guna memperoleh kemanfaatan sungai sebesar-besarnya, dan mengurangi/meniadakan daya rusak air terhadap sungai dan lingkungannya. (Sumber: 7)

Pengguna Jaringan Irigasi

Pemanfaat jaringan irigasi selain petani yang mendapatkan hak guna air secara tersendiri. (Sumber: 2)

Penggunaan Air Irigasi

Kegiatan memanfaatkan air dari petak tertiier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan. (Sumber: 2)

Peningkatan Jaringan Irigasi

Kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi. (Sumber: 2)

Peningkatan Jaringan Reklamasi Rawa

Peningkatan kemampuan pelayanan dari tingkat pelayanan yang telah dicapai sebelumnya. (Sumber: 6)

Penurunan Muka Tanah (Land Subsidence)

Satu fenomena alam turunnya permukaan tanah yang disebabkan oleh pengambilan air tanah yang berlebihan, beban bangunan yang berlebihan, konsolidasi alamiah dari lapisan-lapisan tanah, serta pengaruh gaya-gaya tektonik. (Sumber: 33)

Penyediaan Air Irigasi

Penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air

untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya. (Sumber: 2)

Perbaikan Jaringan Irigasi

Usaha untuk mengembalikan kondisi dan fungsi saluran dan/atau bangunan irigasi secara parsial. (Sumber: 12)

Perbaikan Darurat Jaringan Irigasi

Kegiatan penanggulangan yang berupa perbaikan dan bersifat darurat akibat suatu bencana agar saluran dan/atau bangunan dalam satu sistem jaringan irigasi dapat segera berfungsi. (Sumber: 12)

Perencanaan Sumber Daya Air

Suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air. (Sumber: 1)

Perencanaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Suatu proses perancangan pemeliharaan jaringan irigasi sebelum pelaksanaan pemeliharaan dimulai yang meliputi inspeksi, survei, desain, dan penyusunan program. (Sumber: 12)

Perkolasi

Gerakan air dalam tanah dengan arah vertikal ke bawah. (Sumber: 28)

Perlindungan Sungai

Upaya pengamanan sungai terhadap kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh tindakan manusia dan alam. (Sumber: 7)

Pertanian Rakyat

Budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter per detik per kepala keluarga. (Sumber: 1)

Petak Irigasi

Petak lahan yang memperoleh air irigasi. (Sumber: 5)

Petak Primer

Petak yang terdiri dari beberapa petak sekunder yang airnya dialirkan langsung dari saluran primer. (Sumber: 2)

Petak Sekunder

Petak yang terdiri dari beberapa petak tersier yang kesemuanya dilayani oleh satu saluran sekunder. (Sumber: 2)

Petak Tersier

Kumpulan petak sawah yang merupakan satu kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan irigasi tersier. (Sumber: 2)

Pintu Air Otomatis

Pintu air yang dapat membuka dan menutup secara otomatis akibat perbedaan tinggi muka air di hulu dan di hilir bangunan. (Sumber: 24)

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air

Kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. (Sumber: 1)

Polder

Cekungan tanah alami atau kolam buatan yang digenangi air dan dikelilingi tanggul, tinggi rendah air diatur oleh sejumlah parit yang bermuara di induk parit, dan pada induk parit terdapat mesin pompa untuk membuang air yang berlebihan. (Sumber: 46)

Pos Duga Air

Bangunan di sungai yang dipilih untuk mengamati tinggi muka air secara sistematis agar dapat berfungsi untuk menentukan debit. (Sumber: 16)

Prasarana Sumber Daya Air

Bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung. (Sumber: 1)

Prinsip Satu Sistem Irigasi Satu Kesatuan Pengembangan dan Pengelolaan

Dalam satu daerah irigasi yang mendapat pelayanan irigasi dari satu sistem irigasi yang terdiri atas jaringan primer, jaringan

sekunder, dan jaringan tersier diterapkan satu sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. (Sumber: 2)



Rawa

Lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimia, dan biologis. (Sumber: 6)

Rawa Lebak/rawa non pasang surut/rawa pedalaman

Rawa yang terletak jauh dari pantai sehingga tidak dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. (Sumber: 41)

Rawa Pasang Surut

Tanah rawa yang datar dan rendah melintang oleh saluran interlace dan tidal sloughs dan biasanya tergenang saat pasang. (Sumber: 42)

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula. (Sumber: 2)

Rehabilitasi Lahan

Kegiatan pemulihan kemampuan sumberdaya lahan pertanian yang telah mengalami degradasi lahan. (Sumber: 30)

Rehabilitasi Rawa

Pengembalian kemampuan pelayanan jaringan reklamasi rawa seperti keadaan semula. (Sumber: 6)

Reklamasi Rawa

Upaya meningkatkan fungsi dan pemanfaatan rawa untuk kepentingan masyarakat luas. (Sumber: 6)

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

Hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air. (Sumber: 1)

S

Revetment

Batu atau material lain yang digunakan untuk memperkuat dinding, dll. (Sumber: 40)

Rip-Rap

Susunan bongkahan batu alam atau blok-blok beton buatan dengan ukuran dan volume tertentu yang digunakan antara lain sebagai tambahan peredam energi di hilir bendung dan sebagai lapisan perisai untuk mengurangi kedalaman penggerusan setempat dan untuk melindungi tanah dasar di hilir peredam energi bendung. (Sumber: 34)

Saluran Irigasi Air Tanah

Bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi. (Sumber: 2)

Saluran Primer

Saluran utama dari jaringan reklamasi rawa yang berfungsi baik untuk pembuangan maupun pemberian air. (Sumber: 6)

Saluran Sekunder

Cabang utama dari saluran primer rawa yang berfungsi untuk pembuangan maupun pemberian air. (Sumber: 6)

Saluran Suplesi

Saluran pembawa yang berfungsi membawa/mengalirkan air yang disuplesiakan ke saluran pembawa atau ke sungai. (Sumber: 45)

Saluran Tersier

Cabang saluran sekunder yang berfungsi baik sebagai pembuangan maupun pemberian air. (Sumber: 6)

Sawah Irigasi (Luas Sawah Fungsional)

Sawah yang merupakan bagian dari luas potensial yang sumber airnya berasal dari saluran melalui sistem jaringan irigasi melalui sistem jaringan irigasi. (Sumber: 45)

Seawall

Dinding banjir yang berfungsi sebagai

pelindung/penahan terhadap kekuatan gelombang. (Sumber: 42)

Sedimen Abrasif

Sedimen yang terdiri dari pasir keras dan tajam bersama dengan aliran dapat menimbulkan erosi pada permukaan konstruksi. (Sumber: 28)

Sedimen Dasar

Sedimen pada dasar sungai/saluran. (Sumber: 28)

Sedimen Layang

Sedimen di dalam air, yang melayang karena gerakan air. (Sumber: 28)

Sedimentasi

Proses dimana sedimen yang terjadi karena penghambatan pada aliran air terdeposit pada saluran air, saluran pembuangan terbuka atau pada pipa pembuang. (Sumber: 44)

Siphon

Bangunan air yang dipakai untuk mengalirkan air irigasi dengan menggunakan gravitasi yang melewati bagian bawah saluran pembuangan, cekungan, anak sungai atau sungai. (Sumber: 45)

Sistem Drainase Makro

Jaringan drainase yang mengumpulkan air buangan dari jaringan drainase mikro dan menyalirkannya ke sistem pembuangan alamiah terdekat seperti sungai, danau, dan (Sumber: 38)

Sistem Drainase Mikro

Jaringan drainase yang melayani suatu kawasan perkotaan yang telah terbangun (luas tipikal sekitar 10 Ha) seperti perumahan, kawasan perdagangan, industri, pasar, atau komplek pertokoan. (Sumber: 38)

Sistem Irigasi

Prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia. (Sumber: 12)

Subak

Masyarakat hukum adat yang bersifat sosio agraris religius yang secara historis tumbuh dan berkembang sebagai

organisasi dibidang tata guna air ditingkat usaha tani. (Sumber: 45)

Sudetan

Alur baru yang dibuat di luar alur sungai lama untuk keperluan-keperluan pengelakan aliran, penurunan muka air banjir, dan pembangunan bendung. (Sumber: 28)

Sumber Air

Tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. (Sumber: 1)

Sumber Daya Air

Air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. (Sumber: 1)

Sumur Air Tanah Dalam

Sarana penyediaan air bersih berupa sumur dalam yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman muka air minimal 7 meter dari permukaan tanah dan kedalaman dasar lebih dari 30 meter. (Sumber: 27)

Sumur Pemeriksaan

1. Sebuah sumur yang tidak dipompa dan digunakan untuk mengamati peningkatan permukaan air di bawah tanah atau permukaan piezometrik.
2. Sumur yang digunakan untuk mengamati suatu hasil, tetapi umumnya pada kondisi yang berbahaya, seperti gangguan pada kandungan air asin atau polutan yang terdapat pada air tanah. (Sumber: 42)

Sungai

Tempat-tempat dan wadah-wadah serta bukit-bukit dan medan yang tinggi, yang pada tempat-tempat tertentu diperkuat dengan pasangan. (Sumber: 45)

T

Talang Air

Bangunan air yang dipakai untuk mengalirkan air irigasi dengan menggunakan gravitasi yang melewati bagian atas saluran pembuangan, cekungan, anak sungai atau sungai. (Sumber: 45)

Tanggul Banjir

Konstruksi untuk mencegah terjadinya banjir di belakang tanggul tersebut. (Sumber: 28)

Tanggul Sungai

Sebuah bendungan rendah atau dinding yang menyeberangi sebuah sungai untuk menaikkan tingkat hulu. (Sumber: 44)

Tata Air

Susunan dan letak air, yaitu semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah (tidak termasuk dalam pengertian ini air terdapat di laut). (Sumber: 45)

Tata Pengairan

Susunan dan letak sumber-sumber air dan atau bangunan-bangunan pengairan menurut ketentuan teknik pembinaannya di suatu wilayah pengairan tertentu. (Sumber: 45)

Tebing Sungai

Sisi alamiah sungai yang membatasi pengaliran sungai pada ketinggian air normal. (Sumber: 45)

Terasinger

Bangunan konservasi tanah yang dibuat sejajar garis kontur yang dilengkapi saluran peresapan, saluran pembuangan air (SPA) serta tanaman penguat teras yang berfungsi sebagai pengendali erosi. (Sumber: 30)

Terowongan

Saluran yang membawa air menembus bukit-bukit dan medan yang tinggi, yang pada tempat-tempat tertentu diperkuat dengan pasangan. (Sumber: 45)

Tetrapod

Salah satu jenis konstruksi pemecah gelombang (Break Water). (Sumber: 36)

Tinggi Muka Air (Water Level)

Elevasi permukaan air pada suatu penampang melintang sungai terhadap suatu titik elevasi tertentu. (Sumber: 22)

W

Waduk

Wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai. (Sumber: 7)

Waduk Kaskade

Beberapa waduk yang dibangun pada satu sungai yang sama dan biasanya beroperasi dalam satu sistem integrasi. (Sumber: 23)

Wilayah Sungai

Kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km². (Sumber: 1)

Wilayah Pantai

Wilayah pertemuan antara daratan dan lautan. (Sumber: 37)

Z

Zona Pemanfaatan Sumber Air

Ruang pada sumber air (waduk, danau, rawa, atau sungai) yang dialokasikan, baik sebagai fungsi lindung maupun fungsi budidaya. (Sumber: 1)

SUMBER:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2001 tentang Irigasi
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1991 Tentang Rawa
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1991 Tentang Sungai
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 54 tahun 1980 tentang Kebijaksanaan Mengenai Pencetakan Sawah
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Dewan Sumber Daya Air
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30 /PRT/M/2007 Tentang Pedoman Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 32 / PRT / M / 2007 Tentang Pedoman Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
13. SNI 03-0090-1999 Tentang Spesifikasi Bronjong Kawat
14. SNI 03-3441-1994 tentang Tata Cara Perencanaan Teknik Pelindung Tebing Sungai dari Pasangan Batu
15. SNI 03-2819-1992 tentang Metode Pengukuran Debit Sungai dan Saluran Terbuka dengan Alat Ukur Arus Tipe Baling-Baling
16. SNI 03-2526-1991 tentang Metode Pemilihan Lokasi Pos Duga Air di Sungai
17. SNI 03-2415-1991 tentang Metode Perhitungan Debit Banjir
18. SNI 03-1731-1989 tentang Tata Cara Keamanan Bendungan
19. Revisi SNI 03-3409-1994 Tentang Tata Cara Pengukuran Kecepatan Aliran Pada Uji Model Hidraulik Fisik (UMH-Fisik) Dengan Alat Ukur Kecepatan Aliran Tipe Tabung Pilot
20. Revisi SNI 03-3965-1995 Tentang Tata Cara Pembuatan Model Fisik Sungai Dengan Dasar Tetap
21. Pedoman Konstruksi dan Bangunan No. Pd T-09-2004-A tentang Perencanaan Bendung Karet Isi Udara
22. Pedoman Konstruksi dan Bangunan No. Pd T-20-2004-A tentang Monitoring dan Evaluasi Hasil Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dalam Rangka Pengisian Waduk
23. Pedoman Konstruksi dan Bangunan No. Pd T-21-2004-A tentang Pengoperasian Waduk Kaskade Berpola Listrik-Listrik Multiguna
24. Adhi Widjaja, dkk. 1997. Pengelolaan Tanah dan Air di Lahan Pasang Surut. Proyek Penelitian Pengembangan Pertanian Rawa Terpadu-ISDP Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. www.pustaka-deptan.go.id
25. Anonim. 2003. "Section Groundsill" Progo Diperbaiki Maret . www.indomedia.com
26. Anonim. 2005. Kalau Pemkab Magelang Jual Air ke Yogyakarta. www.digilib.ampl.or.id
27. Anonim. 2008. Sumur Dalam. www.dimsum.its.ac.id
28. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertumbuhan dan Prasarana Wilayah. 2002. Pedoman / Petunjuk Teknik dan Manual Irigasi (Standar Perencanaan Irigasi).
29. Departemen Kehutanan
30. Direktorat Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian. 2007. Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Tani Konservasi Lahan Terpadu (PULKLT). www.pla.deptan.go.id
31. Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. 2007. Pemanasan Global. www.geo.ugm.ac.id
32. Hindarko. 2002. Manfaatkan Air Tanah tanpa Merusak Kelestariannya. ESHA. Jakarta
33. Kelompok Keilmuan Geodesi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung. Pemantauan Penurunan Tanah (Land Subsidence) di Kota-Kota Besar dengan GPS. www.geodesy.gd.itb.ac.id
34. Mawardi, Erman dan Momed. Mohd. 2002. Desain Hidraulik Bendung Tetap untuk Irigasi Teknis. ALFABETA. Bandung
35. Penyusunan Arahan Pemanfaatan Ruang Daerah Aliran Sungai (DAS) Asahan Ditjen Tata Ruang, 2007
36. Pusat Komunikasi Publik Departemen Pekerjaan Umum. 2006. Pulau Nipah Prioritas Tinggi untuk Dikembangkan. www.penataanruang.net
37. Sampurno. Pengembangan Kawasan Pantai Kaitannya dengan Geomorfologi. Proceeding Studi Dampak Timbal Balik Antar Pembangunan Kota dan Perumahan di Indonesia dan Lingkungan Global. Departemen Geologi Institut Teknologi Bandung
38. Soenarno. 2004. Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Banjir dan Drainase Perkotaan. www.air.bappenas.go.id
39. Wahyundari, I Gusti Ayu Putu. 2007. Bahaya Abrasi dan Penanggulangannya. www.baliprov.go.id
40. Wehmeier, Sally. 2005. Oxford Advanced Learner's Dictionary.7th edition.Oxford University Press.New York
41. Website Staf Akademik Universitas Gajah Mada (www.bws.staff.ugm.ac.id)
42. Kamus Intranet Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum ([wrdc.net](http://www.wrdc.net))
43. Webiste Wikipedia Indonesia (www.id.wikipedia.org)
44. Kamus Teknik Multibahasa ICID (*International Commission on Irrigation and Drainage*) tentang Irigasi dan Drainase
45. Website Departemen Pekerjaan Umum (www.pu.go.id)
46. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring (www.pusatbahasa.diknas.go.id)
47. Corbell, Jean-Claude dan Archambault Ariane. 2007. The Visual Dictionary with Definitions. QA International Canada
48. Bahan Rapat Panitia Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang Tata Ruang.2007. Kawasan Berbentuk Hutan pada Daerah Aliran Sungai (DAS)
49. Website Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur (www.dpuaairjatim.org)
50. Website Universitas Negeri Malang (www.malang.ac.id)